
**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN BANGUN
DAN CEGAH WILAYAH KUMUH (GERBANG CAHAYAKU) DI
DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KARANGPAWITAN
KABUPATEN GARUT**

*Realization of The Implementation of The Movement to Build and
Prevent Slum Areas (Gerbang Cahayaku) Program in Tanjungsari Village,
Karangpawitan Sub-District, Garut District*

¹Riantiarni Rahmawati Ningrum, ²Rita Myrna

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

¹riantiarni20001@mail.unpad.ac.id, ²myrna@unpad.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Kawasan Kumuh,
Implementasi Program,
Gerbang Cahayaku.

Desa Tanjungsari yang terletak di Kabupaten Garut memiliki potensi sebagai kawasan kumuh karena berbatasan dengan perkotaan, seiring dengan regulasi yang mengidentifikasi wilayah tersebut sebagai kawasan rawan kumuh. Dalam konteks ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut memiliki visi untuk mengurangi luas kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada Program Gerbang Cahayaku. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi proses implementasi Program Gerbang Cahayaku dan sejauh mana program tersebut berhasil diwujudkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan teori kebijakan program oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983). Pendekatan ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat aspek yang mempengaruhi kinerja atau dampak program, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, secara umum dapat dianggap baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan, terutama terkait konsistensi masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan dan ketidakmatangan perencanaan yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target indikator pembangunan (7+1). Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan untuk wilayah pembangunan selanjutnya.

Keywords:
Slum Areas, Program Implementation, Gerbang Cahayaku.

Abstract

Tanjungsari Village, located in Garut Regency, has the potential to become a slum area due to its urban borders, along with regulations that identify the area as a slum-prone area. In this context, the Garut Regency Housing and Settlement Service has a vision to reduce the size of slum areas, focusing on the Gerbang Cahayaku program. This research aims to investigate the implementation process of the Cahayaku Gate Program and the extent to which the program has been successfully realized. The method used was a qualitative approach based on the program policy theory by G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (1983). This approach involved interviews, observation, and documentation, with data analysis involving data reduction, data presentation, and inference. The results show that the four aspects that influence program performance or impact, namely Environmental Conditions, Inter-Organizational Relations, Organizational Resources, and Characteristics and Capabilities of Implementing Agencies, can generally be considered good. Nevertheless, there are still some shortcomings in the implementation, especially related to the consistency of the local community in protecting the environment and the immaturity of planning, which ultimately affects the achievement of development indicator targets (7+1). Therefore, it is necessary to evaluate and improve the implementation of the Cahayaku Gate Program in order to achieve the desired goals for the next development area.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terpadat ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 277,7 juta jiwa (BPS, 2023). Salah satu daerah yang mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu Kabupaten Garut. Tentu dengan adanya pertumbuhan penduduk yang padat ini seringkali menimbulkan permasalahan publik seperti kawasan kumuh akibat jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan Keputusan Bupati Garut No 100/kep.175-Disperkim/2017 Tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagai Lokasi Penataan dan Peningkatan Perumahan dan Permukiman dalam Rangka Pencegahan Kawasan Kumuh, terdapat bahwa 6 kecamatan terpadat tersebut terindikasi kumuh, adapun akan dilampirkan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk pada 6 Kecamatan Terindikasi Kumuh di Kabupaten Garut

No.	Kecamatan	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun (%)	
		2021	2022	2020-2021	2021-2022
1	Garut Kota	127,71	127,98	0,07	0,21
2	Tarogong Kidul	115,66	116,49	0,45	0,72
3	Tarogong Kaler	97,10	98,39	0,90	1,33

No.	Kecamatan	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun (%)	
		2021	2022	2020-2021	2021-2022
4	Karangpawitan	137,82	140,03	1,11	1,60
5	Wanaraja	48,72	49,22	0,68	1,02
6	Pameungpeuk	42,56	43,38	0,67	1,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 1, kecamatan yang mempunyai penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Karangpawitan. Kecamatan ini terdiri dari 20 desa, dimana salah satunya yaitu Desa Tanjungsari. Desa ini merupakan salah satu desa yang penduduknya selalu meningkat di setiap tahunnya. Desa Tanjungsari merupakan kawasan yang berbatasan dengan kota sehingga susunan rumah yang ada disana besarnya tidak merata yang membuat rumah tersebut berdempetan dan terkesan kumuh. Selain itu, Desa Tanjungsari merupakan daerah yang mempunyai mata air, namun pengelolaannya belum maksimal. Oleh karena itu, ketika diidentifikasi menggunakan Indikator 7+1, yakni tujuh indikator utama dan satu indikator tambahan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pemerintah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, diketahui bahwa indikator tersebut di Desa Tanjungsari sudah ada namun kuantitasnya tidak terpenuhi. Permasalahan terkait hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat untuk menanganinya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam mengatasi permukiman kumuh. Mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 terdapat salah satu program, yaitu Gerakan Bangun dan Cegah Wilayah Kumuh (Gerbang Cahayaku).

Program Gerbang Cahayaku bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran meningkatnya kualitas perumahan, prasarana, dan sarana kawasan permukiman dengan metode Swakelola Tipe IV yang mana dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat. Adapun program ini dilaksanakan di Desa Tanjungsari pada tahun 2022, tepatnya di Kampung Cireundeu RW 05. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan seperti realisasi target indikator pembangunan Gerbang Cahayaku tidak mencapai target awal, yaitu pengelolaan sampah. Kemudian, terkait kondisi setelah pembangunan masih terdapat kurangnya pemeliharaan dari masyarakat untuk lingkungan, yang mana membuat lingkungan tersebut masih terlihat kumuh. Fenomena ini menarik untuk diteliti sehingga lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjungsari. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Gerbang Cahayaku yang telah dijalankan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam program tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Mochammad Nahdi Mubarak (2023) memperlihatkan bahwa koordinasi dalam implementasi program sangat krusial karena semua pihak yang terlibat perlu memantau jalannya kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori dan fokus, dimana penulis menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) yang menekankan empat aspek berpengaruh pada kinerja dan dampak program, yaitu kondisi

lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, dan karakteristik agen pelaksana. Sementara itu, penelitian ini mengacu pada teori Riant Nugroho (2003:162-163) yang menyoroti empat elemen implementasi kebijakan, yakni strategi implementasi (pra-implementasi), pengorganisasian, penggerakan kepemimpinan, dan pengendalian sistem informasi manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Miss Tuta Fadhla (2022) memperlihatkan bahwa kendala dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya pembaruan data sebagai dasar kegiatan program dan minimnya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan program. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi Grindle dengan mengukur variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, berbeda dengan penulis yang lokus penelitiannya dilakukan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.

Penelitian mengenai kawasan kumuh juga pernah dilakukan oleh Vian Frisca Aisyahwati (2018) memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang berjalan dengan baik. Teori yang digunakan adalah teori Grindle (1980), di mana terdapat faktor-faktor yang belum terpenuhi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program ini dengan menjaga lingkungan agar tetap layak huni dan bebas dari kekumuhan. Selain itu, masih ada beberapa rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menyebabkan kendala dalam penataan bangunan (Aisyahwati, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli menyatakan bahwa terdapat 4 aspek yang mempengaruhi kinerja serta dampak suatu program, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi serta karakteristik, dan kapabilitas instansi pelaksana. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti mengenai realisasi kebijakan Program Gerakan Bangun dan Cegah Wilayah Kumuh (Gerbang Cahayaku) di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, serta bagaimana evaluasi kedepannya agar mampu terciptanya tujuan utama dari Progam Gerbang Cahayaku.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh penulis agar mampu menggambarkan, memperdalam serta memahami sebuah fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian, sebab pendekatan kualitatif sifatnya holistik atau menyeluruh dalam suatu konteks (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, studi literatur atau dokumen, observasi, dan materi audio. Dokumen yang digunakan, yaitu terkait dengan landasan terbentuknya Program Gerbang Cahayaku seperti Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Bupati, Rencana Strategis Dinas, serta Keputusan Bupati. Sedangkan, wawancara dilakukan dengan beberapa informan, yaitu:

1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut;
2. Sekretaris Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
3. Kepala Dusun III/RW 05 Kampung Cireunde;
4. Ketua Tim Pelaksana Gerbang Cahayaku;
5. Sekretaris dan Bendahara Gerbang Cahayaku;
6. Masyarakat penerima bantuan Gerbang Cahayaku di Kampung Cireunde RW 05.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber utama, yakni data primer yang diperoleh melalui informan yang telah dipilih dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat menyediakan informasi yang relevan. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif mengikuti pendekatan yang diusulkan oleh Miles dan rekan-rekannya (2014). Analisis tersebut terdiri dari tiga tahap: pertama, kondensasi data yang melibatkan penyusunan, pemotongan, penajaman, dan pengorganisasian data untuk merumuskan kesimpulan "final" sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Creswell (2014). Kedua, *display* data, yang melibatkan penataan data dan informasi yang telah terorganisasi untuk mempermudah analisis selanjutnya, sejalan dengan konsep yang diperkenalkan oleh Moleong (1993). Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir yang melibatkan penyimpulan atau verifikasi data yang telah dikumpulkan dan dipaparkan, sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Moleong (1993).

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, studi dokumen terkait program, dan tinjauan literatur. Proses analisis data mencakup kategorisasi, pemetaan, dan analisis deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi program dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, verifikasi terhadap semua jenis data yang diperoleh dilakukan melalui metode triangulasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Lingkungan Desa Tanjungsari

Berdasarkan temuan lapangan, lingkungan kampung Cireundeu dikategorikan sebagai daerah kumuh ringan. Pengukuran indikator 7+1 menunjukkan bahwa keberadaan tujuh indikator tersebut memang sudah ada, namun kuantitasnya tidak terpenuhi. Faktanya, kondisi rumah di Lampung Cireundeu tidak teratur karena posisinya berseberangan dengan perumahan, menyebabkan perbedaan luas rumah dan memberikan kesan kumuh. Adapun terkait analisa tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Kondisi Fisik Terduga Kumuh RW 05 Berdasarkan Hasil Review
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut

No.	Aspek	Kriteria	Kondisi		Rata-rata Kondisi
			Jumlah	Persentase	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	55,00 Unit	34,59%	23,27%
		Kepadatan bangunan	-	0,00%	
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	56,00 Unit	35,22%	
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	1.250,00 Meter	30,51%	15,25%
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	530,00 Meter	12,83%	
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	1,00 KK	0,62%	50,00%
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	161,00 KK	100,00%	

No.	Aspek	Kriteria	Kondisi		Rata-rata Kondisi
			Jumlah	Persentase	
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	0,35 Ha	10,00%	27,56%
		Ketidaksediaan drainase	1.100,00 Meter	48,89%	
		Ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota	500,00 Meter	22,22%	
		Tidak terpeliharanya drainase	1.000,00 Meter	44,44%	
		Kualitas konstruksi drainase	1.000,00 Meter	44,44%	
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air	-	-	36,65%
		Limbah tidak sesuai standar teknis	48,00 KK	29,81%	
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai syarat teknis	70,00 KK	43,48%	
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	161,00 KK	100,00%	98,96%
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai syarat teknis	156,00 KK	96,89%	
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	161,00 KK	100,00%	
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran	-	-	100,00%
		Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	159,00 Unit	100,00%	
Total Nilai					33 (Kumuh Ringan)

Sumber: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Desa Tanjungsari, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat terlihat bahwa tidak adanya indikator kondisi proteksi kebakaran sebab Kampung Cireundeu juga merupakan kawasan alih fungsi, di mana tempat tinggal masyarakat berdampingan dengan kegiatan mata pencaharian sehari-hari, seperti peternakan atau pertanian. Hal ini membuat lokasi ini rentan terhadap risiko kebakaran karena kurangnya Ruang Terbuka Publik (RTP). Oleh karena itu, kondisi lingkungan di Kampung Cireundeu memang nyata kumuh dan berhak untuk diberikan bantuan pencegahan wilayah kumuh. Namun, setelah Gerbang Cahayaku dibangun, masyarakat masih kurang konsisten dalam menjaga lingkungan, dengan kepatuhan hanya bertahan selama 2 minggu setelah pelaksanaan. Meskipun demikian, kolaborasi masyarakat, terutama remaja masjid yang diinisiasi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari berhasil mengatasi permasalahan sampah di sepanjang jalan dengan melakukan kegiatan bakti secara berkala. Hal ini sejalan dengan teori Cheema dan Rondinelli (1983:48) yang menyatakan bahwa keberhasilan program bergantung pada komunikasi efektif antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Menurut mereka, jika lingkungan mendukung, masyarakat akan lebih aktif

memperhatikan sumber daya yang diberikan. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan dari pembuat kebijakan kepada masyarakat diharapkan dapat mengarahkan partisipasi dalam pemeliharaan lingkungan pasca-implementasi Program Gerbang Cahayaku. Pendekatan terdesentralisasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal, sesuai dengan pandangan Cheema dan Rondinelli (1983:557), menjadi relevan dalam konteks ini untuk lebih disukai dan efektif.

Pembahasan diatas memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan dampaknya suatu program. Hasil analisis ditemukan bahwa masyarakat masih kurang menjaga lingkungan setelah adanya pembangunan Gerbang Cahayaku. Tetapi, hal ini mampu diatasi dengan cara pendekatan kepada masyarakat melalui instansi pelaksana, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari dengan mengadakan kerja bakti oleh remaja masjid rutin pada setiap bulannya.

2. Hubungan Antar Organisasi Gerbang Cahayaku

Hubungan antar organisasi pada Program Gerbang Cahayaku melibatkan aktor-aktor yang perlu memiliki pandangan seragam, terutama antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari. Meskipun keduanya memiliki komitmen besar, terlihat bahwa pada pelaksanaan, pemahaman penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih kurang, terutama pada tahap perencanaan. Penelitian menunjukkan bahwa SOP hanya disampaikan secara lisan melalui pembekalan di Balai Desa Tanjungsari, tanpa disertakan secara fisik. Hal ini menjadi kelemahan yang perlu diperhatikan lebih cermat pada tahap perencanaan untuk memastikan aspek teknis kecil dapat diperhatikan dengan baik. Jika dianalisis berdasarkan teori Cheema dan Rondinelli (1983:49), perlu lebih fokus pada kompetensi inti dengan menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama. Selain itu, Cheema dan Rondinelli (1983:536) menyarankan agar SOP dapat diakses dengan mudah melalui situs *web* canggih yang menyediakan informasi rinci. Oleh karena itu, perubahan dalam SOP dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti situs *web* terkait SOP yang mengikat.

Terkait permasalahan indikator pengelolaan sampah yang belum terpenuhi, pada faktanya diapangan diatasi dengan kolaborasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dengan memberikan bantuan tempat sampah dan meletakkannya di beberapa titik, sebagaimana Gambar 1 berikut:



Gambar 1

Bantuan Tempat Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Sumber: Arsip Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, 2022.

Hasil analisis menurut teori Cheema dan Rondinelli (1983:561) menekankan bahwa dukungan politik pusat sangat penting untuk kelangsungan program dalam mendukung pengelolaan yang efektif. Selain itu, pandangan Cheema dan Rondinelli (1983:520) menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi berpengaruh pada kesenjangan implementasi, mengingat pengelolaan yang efektif memerlukan mekanisme tanggung jawab pemerintahan bersama. Berdasarkan penemuan hasil lapangan diatas, maka permasalahan untuk indikator pengelolaan sampah sudah terselesaikan dengan adanya salah satu indikator, yaitu dukungan dari beberapa instansi yang berperan dalam bidangnya lalu mengatasinya secara bersama-sama.

3. Sumber Daya Organisasi dalam Pelaksanaan Gerbang Cahayaku

Sumber daya organisasi dalam proyek Gerbang Cahayaku terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dalam ranah sumber daya manusia, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari berperan sebagai Tim Pelaksana Kerja (TPK), sementara Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). TPK yang diwakili oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari memiliki aset sumber daya manusia yang unggul. Selama pelaksanaan, setiap individu yang terlibat memberikan kontribusi maksimal. Menurut narasumber, kinerja mereka telah dinilai baik, terutama Sekretaris yang konsisten dalam pengiriman laporan setiap minggu dan Bendahara yang efektif mengelola keuangan dengan ketegasan.

Sementara itu, sumber daya anggaran untuk Program Gerbang Cahayaku sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, mulai dari proses pengajuan hingga pencairan. Adapun terkait rincian penggunaan dana dari Program Gerbang Cahayaku disajikan sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Laporan Penggunaan Dana Program Gerbang Cahayaku

No.	Indikator	Pengeluaran (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rumah Tidak Layak Huni (2 unit)		
	Bahan	63.505.500	
	Upah	29.160.000	92.665.500
2	Pembangunan Jalan Lingkungan		
	Bahan	48.360.000	
	Upah	11.570.000	59.930.000
3	Perbaikan Drainase Lingkungan		
	Bahan	43.274.000	
	Upah	17.010.000	60.284.000
4	Sanitasi Air Bersih atau Mandi Cuci Kakus (MCK)		
	Bahan	87.659.500	
	Upah	59.500.000	147.159.500
5	Saluran Air Bersih atau Broncaptering		

No.	Indikator	Pengeluaran (Rp)	Jumlah (Rp)
	Bahan	19.851.000	
	Upah	5.860.000	25.711.000
6	Pengelolaan Sampah		
	Bahan	-	
	Upah	-	-
7	Sarana Proteksi Kebakaran dan Ruang Terbuka Publik (RTP)		
	Bahan	29.536.000	
	Upah	5.180.000	34.716.000
8	Pembangunan Gapura		
	Bahan	13.150.000	
	Upah	1.995.000	15.145.000
9	Biaya Operasional		
		15.949.000	15.949.000
		Kumulatif (Rp)	451.560.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Program Gerbang Cahayaku, 2022.

Semua tahapan terkait penganggaran telah berjalan sesuai prosedur, yang memastikan pemenuhan fasilitas publik bagi warga Kampung Cireundeu.

4. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana Gerbang Cahayaku

Keberhasilan suatu program sangat tergantung pada karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Dalam konteks ini, instansi tersebut harus mampu mengkoordinasikan, mengawasi, dan menyelaraskan keputusan dengan kelompok sasaran program. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengkoordinasikan kelompok sasaran, terutama dalam keterlibatan aktif masyarakat pada pembangunan Gerbang Cahayaku, terutama penerima bantuan seperti rutilahu.

Meskipun demikian, Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari mengalami kendala dalam memilih tukang bangunan dari Kampung Cireundeu. Perubahan *timeline* pelaksanaan dari 120 hari menjadi 150 hari kerja jelas diluar ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebagaimana Gambar 2 berikut:

KETIGA : Masa tugas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan swakelola selama 4 (empat) bulan dan/atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai;
Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pekerjaan Gerakan Bangun dan Cegah Wilayah Kumuh (GERBANG CAHAYAKU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;

Gambar 2

Surat Keputusan Bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Tanjungsari

Sumber: Arsip BKM Desa Tanjungsari, 2022.

Berdasarkan observasi, hal ini lambat dari SOP yang sudah ditentukan disebabkan oleh pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang memerlukan waktu lebih lama. Dalam perspektif teori Cheema dan Rondinelli (1983:526), pelaksanaan kebijakan atau rencana yang membutuhkan keterampilan teknis tertentu memerlukan personel dengan keterampilan tersebut atau sarana untuk melatih individu agar memiliki keterampilan tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan untuk kuli bangunan dalam Program Gerbang Cahayaku, khususnya untuk pembangunan infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, dan lingkungan permukiman untuk memastikan keberhasilan program ini. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pelaksanaan Program Gerbang Cahayaku masih diperlukan evaluasi jika ingin dilaksanakan secara menerus ke depannya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Kondisi lingkungan Desa Tanjungsari sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya membutuhkan bantuan serta selaras dengan tujuan akhir dari Program Gerbang Cahayaku. Namun pada saat setelah pembangunan, perilaku masyarakat masih sulit untuk berkomitmen dalam menjaga lingkungan. Hal ini membuat lingkungan sekitar pembangunan Gerbang Cahayaku masih terlihat kumuh.
2. Pada saat pelaksanaan, pengerjaan pembangunan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, dimana tertera dalam SOP pembangunan 120 hari (4 bulan), namun kenyataan lapangan pembangunan menjadi 150 hari. Hal ini disebabkan oleh tukang bangunan Gerbang Cahayaku kurang kompeten dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Terdapat ketidaksesuaian pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang menyebabkan pembangunan menjadi 2 kali, hal ini dikarenakan aktor terkait belum sepenuhnya memahami SOP yang berlaku akibat sosialisasi SOP hanya dilakukan secara paparan saja, tidak diberikan berupa SOP fisiknya.

Saran yang mampu diberikan kepada pihak terkait pada penelitian ini, diantaranya:

1. Sosialisasi setelah pembangunan Gerbang Cahayaku dan memberikan peraturan berupa sanksi bagi masyarakat yang melakukan perusakan lingkungan.
2. Memberikan pelatihan untuk Sumber Daya Manusia yang terlibat, khususnya pada BKM Desa Tanjungsari untuk menyeleksi tukang dalam pembangunan Gerbang Cahayaku.
3. Memperhatikan seluruh aktor terkait pemahaman SOP yang ditetapkan, bukan hanya melalui sosialisasi awal saja, namun diberikan *print out* berupa SOP fisik.

REFERENSI

- Aisyahwati, Vian Frisca. (2018). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh: Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Bupati Garut. (2017). *Keputusan Bupati Garut Nomor 200/kep.175-Disperkim/2017 Tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagai Lokasi Penataan dan Peningkatan Perumahan dan Permukiman dalam Rangka Pencegahan Kawasan Kumuh*. Garut.

- Bupati Garut. (2019). *Peraturan Bupati Garut Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019-2024*. Garut.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G. Shabbir, Cheema and Dennis, A Rondinelli. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, DC: Brookings Institution.
- Lantang, M. (2013). *Analisis Faktor Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Calaca Kota Manado*. Jurnal Sebua Vol. 28(1): 28-34.
- Mubarok, Mochammad Nahdi. (2023). *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota Malang untuk Penanganan Kawasan Kumuh: Studi Program KOTAKU di Zona II Kampung Heritage Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang*. Skripsi. Universitas Islam Malang. Malang.
- Nurcahyo, Eko. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumardiko, Miss. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2020*. Skripsi. Universitas Padjadjaran. Sumedang.